

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT ATAS HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN

Alvina Kristanti

0987004

ABSTRAK

Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* dalam kaitannya dengan pekerja penyandang cacat adalah kedudukan tenaga kerja penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia adalah setara dengan pekerja yang tidak menyandang cacat/normal (bukan penyandang cacat). Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI mengenai perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat secara layak, diperoleh hasil bahwa jumlah perusahaan di Indonesia yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat masih sangat kecil untuk dapat memberikan kesempatan bekerja bagi para tenaga kerja penyandang cacat apabila dibandingkan dengan data jumlah tenaga kerja penyandang cacat yang terdapat di Indonesia, ini menunjukkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap para penyandang cacat. Hal tersebut menimbulkan suatu kajian berkaitan dengan penyandang cacat yang dirasakan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak warga negara Indonesia sehingga mendorong penulis membuat skripsi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja Penyandang Cacat Atas Hak Mendapatkan Pekerjaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder penelitian ini, mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan metode yuridis normatif akan dikaji mengenai kedudukan pekerja penyandang cacat dalam hukum positif di Indonesia, bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja penyandang cacat.

Adanya perlakuan diskriminasi perusahaan terhadap para penyandang cacat tidak sesuai dengan konsep *equality before the law*, karena seharusnya tenaga kerja penyandang cacat mempunyai kedudukan yang sama atau setara dengan pekerja yang tidak menyandang cacat/normal dalam hak mendapatkan pekerjaan. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang cacat dengan adanya peraturan yang mengharuskan setiap perusahaan untuk mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat akibat kecelakaan kerja. Pertanggung jawaban perusahaan secara khusus terhadap pekerja penyandang cacat adalah dengan penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan pemberian alat pelindung diri.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Penyandang Cacat, Hak, Pekerjaan

LEGAL PROTECTION OF DISABLED WORKERS FOR THE RIGHT TO GET A JOB ASSOCIATED WITH THE EMPLOYMENT LEGISLATION

Alvina Kristanti

0987004

ABSTRACT

An equation in before the law or equality before the law in relation with workers with disabilities is a labor with disabilities in acquiring work based on positive law in indonesia is equivalent to workman who does not won a defect / normal (not with disabilities). However, based on the data collected from the ministry of manpower and transmigration of the republic of indonesia regarding the companies in indonesia had recruited labor disabled a manner deserving, obtained the result that the number of companies in indonesia had recruited labor with disabilities are still small to be able to give the opportunity to work for the labor of disabled people compared with the the amount of data labor disabled people who were found in indonesia this really shows you an absence of treatment discrimination against the disabled. This leads to the pertaining to a study of disabled people perceived has the same right to get the job and as a form of legal protection of the rights of indonesian citizen so as to encourage writer make a thesis on protection laws against labor upon the rights of disabled people to get a job associated with legislation employment.

The method used in writing this is in the form of the approach of juridical normative. A method of juridical normative, which is a research that looked at the law that dikonsepan as the norm or maxim which prevails in society. Material of pustaka is basic data research who are categorized as data secondary. Data secondary this research, material law includes primary and secondary material law. With the methods of juridical normative will be assessed on a worker with disabilities in positive law in indonesia the form of the protection of law and the responsibility of the company to labor with disabilities.

The company treatment discrimination against the disabled not in accordance with the concept of equality before the law, because supposed to be labor with disabilities have domicile of being equal or equivalent with workman who does not won a defect / normal in the right to get a job. The form of legal protection of disabled by the presence of labor legislation that requires that each company to employ at least 1 (one) a person with disabilities that fulfills the requirements and qualifications work concerned and social security program labor as a form of legal protection for workers with disabilities a result of a work accident. If in 2008 answer company specifically worker to be disabled by providing aksebilas, is the granting of an instrument of work and granting a protective self.

Keyword : Employment, Disabled People, Right, Job

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	iv
Halaman Persetujuan Panitia Sidang.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II PENGATURAN TENAGA KERJA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	 21
A. Nilai-Nilai Universal Hak Asasi Manusia	21
1. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia	22

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filosofi dan Perundang-undangan di Indonesia	25
3. Penerapan Konsep Hak Asasi Manusia dalam Bidang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	27
B. Pengaturan Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	29
1. Relevansi Hukum Perusahaan dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	34
2. Sifat Hukum Ketenagakerjaan sebagai Hukum yang mengatur (<i>Aanvullend Recht</i>) dan Memaksa (<i>Dwingend Recht</i>)	35
3. Pengaturan Ketenagakerjaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	40
C. Perjanjian Sebagai Landasan Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja	44
1. Unsur-Unsur Esensial Dalam Perjanjian Kerja	48
2. Substansi Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja	54
D. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	60
1. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan	61
2. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di Luar Pengadilan	62
3. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	64

BAB III	ASPEK HUKUM TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	67
	A. Pengertian Umum dan Jenis-Jenis Penyandang Cacat	67
	1. Kebijakan Penanganan Masalah Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat	74
	2. Pekerja Penyandang cacat Diakibatkan Oleh Kecelakaan Kerja	76
	3. Model-Model yang Dipakai Dalam Kebijakan Penanganan Masalah Penyandang Cacat	80
	4. Partisipasi Penyandang Cacat Dalam Aktivitas di Masyarakat.....	84
	B. Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Kerja Bagi Penyandang cacat	87
	1. Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dikaitkan dengan Kualitas Kerja	89
	2. Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat.....	90
	3. Kesesuaian Derajat Kecacatan dengan Jenis Pekerjaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat	91
	C. Prinsip-Prinsip Non Diskriminasi Dalam Hukum Ketenagakerjaan	93
	1. Perbuatan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Pada Umumnya	95
	2. Perbuatan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat	98
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT ATAS HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN	102
	A. Kedudukan Pekerja Penyandang Cacat Dalam Memperoleh Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	102

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat dan Cacat Akibat Kecelakaan Kerja Berdasarkan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.....	113
1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat	114
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Diakibatkan Oleh Kecelakaan Kerja	118
a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat Dikarenakan Oleh Kecelakaan Kerja Dikaitkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional	119
b. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat Dikarenakan Kecelakaan Kerja Dikaitkan dengan Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja	121
C. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Atau Pemberi Kerja Terhadap Pekerja yang Menyandang Cacat	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	133
Daftar Pustaka.....	136